

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang efisien memerlukan suatu perencanaan yang akurat, khususnya mengenai penggunaan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Melalui perencanaan ini, suatu daerah akan dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Perencanaan daerah selayaknya bisa memberikan arahan pada apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya pembangunan seefisien mungkin.

Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 berhak untuk melakukan berbagai tindakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa harus terus tergantung pada Pemerintah Pusat. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Tingkat I seperti Propinsi Jawa Timur antara lain adalah menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah dengan memperhatikan segala potensi yang dimiliki oleh Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan karena beberapa alasan:

- a) Efisiensi alokasi sumber daya karena sumber daya yang dimiliki daerah terbatas.
- b) Menghindari terjadinya fluktuasi ekonomi yang besar.
- c) Mengurangi/memperkecil dampak yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa *uncertainty* (ketidakpastian).

Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur merupakan subsistem dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana program pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rencana-rencana program pembangunan tersebut, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

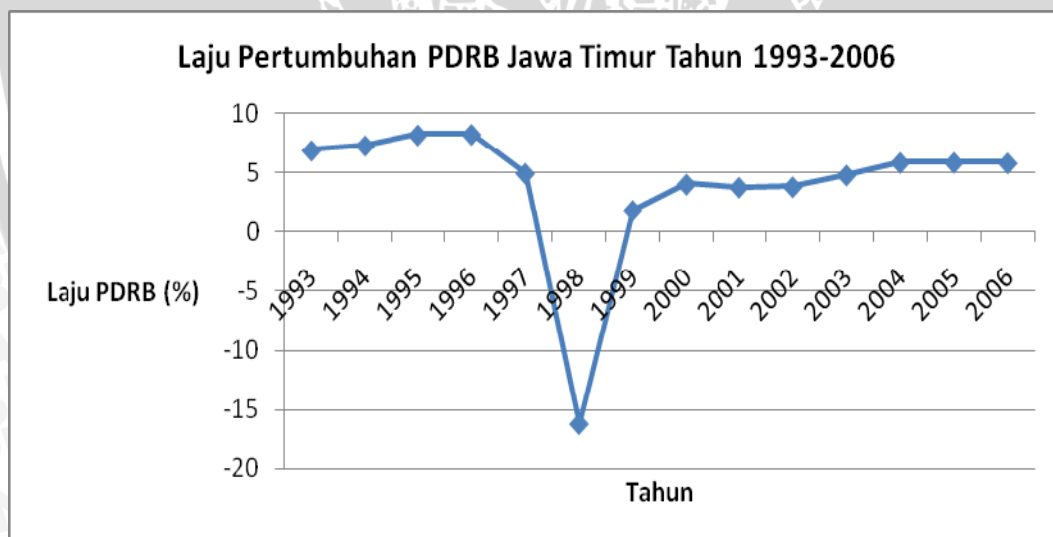
RPJMD berisi tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009. Dengan adanya keterkaitan dengan perencanaan yang lebih tinggi, akan mengefisienkan *sharing* pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi daerah berupa prioritas pembangunan wilayah yang akan dilakukan.

Demikian pula dengan Propinsi Jawa Timur, sebagai daerah otonom perlu kiranya bagi Propinsi Jawa Timur untuk mengetahui dan mengembangkan

potensi daerahnya dimana pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah Jawa Timur. Dalam hal ini potensi daerah dapat dilihat melalui sektor-sektor utama sebagai prioritas yang dapat memacu pembangunan ekonomi daerah Jawa Timur.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur disamping mengembangkan potensi daerahnya, juga berusaha untuk mengolah sumber daya yang ada di wilayahnya. Agar kegiatan pengolahan tersebut lebih terarah, maka diperlukan suatu metode untuk mengetahui manakah yang berperan sebagai basis pembangunan (sektor basis) dari sektor-sektor yang ada, sehingga jika dikembangkan akan bisa memberikan hasil pembangunan yang maksimal mengingat sektor basis adalah sektor yang produktif dalam menopang pembangunan di suatu daerah.

Gambar 1.1: **Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Tahun 1993 – 2006**



Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur, beberapa terbitan 1993-2006 (diolah)

Berdasarkan data pada gambar 1.1 diatas, pada masa sebelum terjadi *external shock* (krisis moneter) yaitu pada tahun 1993-1996, terjadi *booming*

ekonomi dimana seluruh sektor ekonomi berkeajaiban, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur selalu tinggi per tahunnya (selalu diatas 5% pada tahun 1993-1996). Namun, pada masa setelah terjadi *external shock* (krisis moneter) yaitu pada tahun 2000-2006, perekonomian Jawa Timur memasuki tahap *recovery*. Laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur menjadi rendah (tidak setinggi pada masa sebelum krisis moneter). Hal ini dikarenakan pada masa itu terjadi *uncertainty* (ketidakpastian) yang tinggi. Sehingga untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi (laju PDRB) seperti pada masa sebelum terjadi *external shock* (krisis moneter) diperlukan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki Propinsi Jawa Timur.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak lepas dari peranan faktor ekonomi dan politik yang saling terikat (tidak bisa dipisahkan) satu sama lain. Jadi penyusunan suatu perencanaan pembangunan tidak bisa hanya memperhatikan satu faktor saja, karena akan menyebabkan perencanaan pembangunan menjadi tidak efektif. Jika perencanaan pembangunan hanya memperhatikan faktor ekonomi saja, maka stabilitas politik akan terganggu. Sebaliknya, jika perencanaan pembangunan hanya memperhatikan faktor politik saja, maka akan menyebabkan fluktuasi dan ketidakpastian ekonomi yang tinggi, dan alokasi sumber daya juga menjadi tidak efisien karena perencanaan pembangunan tidak memperhatikan keterkaitan potensi daerah, khususnya mengenai basis ekonomi daerah. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasi faktor ekonomi dan politik karena akan mengefektifkan perencanaan pembangunan itu sendiri.

Peranan faktor ekonomi dengan identifikasi sektor basis seharusnya dapat dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur terkait dengan pengembangan potensi daerah berupa prioritas pembangunan

wilayah di Propinsi Jawa Timur. Sehingga, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah “apakah penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi (RPJMD) Propinsi Jawa Timur sudah mempertimbangkan faktor ekonomi khususnya sektor basis daerah?”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan utama di atas, maka muncul beberapa sub-permasalahan yang perlu dikaji, antara lain:

1. Bagaimanakah kebijakan, strategi dan struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur disusun?
2. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Propinsi Jawa Timur?
3. Bagaimanakah kesesuaian antara struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base* (basis ekonomi)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kebijakan, strategi dan struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur.
2. Mengidentifikasi sektor yang menjadi sektor basis di Propinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis kesesuaian antara struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base* (basis ekonomi).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, terutama para pengambil keputusan maupun pelaksana pembangunan daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) tahap berikutnya.
2. Bahan referensi untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi pedoman untuk menggerakkan ekonomi daerah.
3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah ini di kemudian hari.
4. Memberikan gambaran, menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi dalam pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi Jawa Timur.

